SUARA MERDEKA

Halaman 30

Edisi Jumat, 24 Oktober 2014

Opini WTP Butuh Komitmen

BALAI KOTA - Laporan keuangan (LK) yang disampaikan Pemkot Salatiga bisa saja memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, hal tersebut mensyaratkan komitmen kuat dari pimpinan daerah dan seluruh pihak untuk mendapatkannya.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Chris Kuntadi di hadapan seluruh peserta gelar pengawasan daerah Kota Salatiga Tahun 2014 di ruang sidang II balai kota, kemarin. Sebagai catatan, sejak 2005 hingga 2013 laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemkot Salatiga adalah Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Sedangkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Namun, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Bukan Jaminan

Lebih lanjut dikatakan Cris, meskipun WTP tidak menjamin *clean and clear* atas LK, namun hal tersebut menunjukkan bahwa LK telah disajikan secara wajar. "WTP bukan jaminan *clean and clear* atau bebas penyimpangan. Namun setidaknya mengindikasikan jika LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan," kata Cris Kuntadi.

Tujuan dilaksanakan pemeriksaan, dikatakan Chris, untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggungjawab. "Selain itu juga sebagai salah satu upaya meminimalisir penyalahgunaan wewenang, mengamankan keuangan negara serta menegakkan peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka akan diketahui tingkat akuntabilitas dari pemerintah daerah. Terkait akuntabilitas, Chris berharap peran lembaga atau masyarakat untuk ikut mengontrol. "DPRD, LSM dan pers sangat diharapkan kontribusinya dalam hal mengontrol akuntabilitas," katanya. Selain Chris, hadir sebagai narasumber lain adalah Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Bambang Wahyudi, Inspektur Provinsi Jateng, Kunto Nugroho serta Inspektur Kota Salatiga, Niken Lidiastuti.

Kegiatan pengawasan daerah ini digelar atas kerjasama Inspektorat Provinsi Jateng dengan Inspektorat Kota Salatiga. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Ketua DPRD, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Salatiga, para Kepala SMP dan SMA, Kepala BUMD, Camat serta Kepala UPT Dinas Pendidikan Se-Kota Salatiga. (H54-64)